

STRATEGI PEMERINTAH KOTA SERANG DALAM MENINGKATKAN PERAN BANK SAMPAH UNTUK MEWUJUDKAN KOTA BERSIH DAN BERKELANJUTAN

Nazwa Salsabila¹, Elsa Nursolihah², Alin Puspitasari³
nazwa9115@gmail.com¹, elsanursolihah8@gmail.com², alineapuspita@gmail.com³
Universitas Sultan Angeng Tirtayasa

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kota Serang untuk memperbaiki peran bank sampah dalam upaya menciptakan kota yang bersih dan berkelanjutan. Masalah limbah semakin rumit karena faktor yang pertumbuhan penduduk, ekspansi daerah pemukiman, serta pola konsumsi masyarakat yang cenderung meningkatkan jumlah sampah. Bank sampah muncul sebagai solusi yang berlandaskan komunitas, berfokus tidak hanya pada pengurangan jumlah sampah, tetapi juga mendorong perubahan sikap masyarakat dalam menangani limbah sejak dari sumbernya. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan adanya kendala seperti rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakstabilan kelembagaan, kurangnya sarana, serta dukungan pemerintah yang belum merata. Pemerintah telah berupaya menyediakan fasilitas, memberikan pendampingan, serta memperkuat forum koordinasi, tetapi hasilnya belum maksimal. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak, integrasi data, pendidikan yang berkelanjutan, serta insentif untuk memastikan keberlangsungan bank sampah. Temuan ini menyoroti betapa pentingnya memperkuat kolaborasi antar pihak.

Kata Kunci: Bank Sampah, Strategi Pemerintah, Kolaborasi, Pengelolaan Sampah, Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Persoalan persampahan hingga saat ini masih menjadi salah satu tantangan serius dalam pembangunan perkotaan di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan kawasan permukiman, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin praktis dan berbasis produk sekali pakai telah menyebabkan volume sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek kebersihan lingkungan, tetapi juga menimbulkan persoalan kesehatan, sosial, dan ekonomi apabila tidak dikelola secara tepat. Di banyak kota, persoalan sampah bahkan telah menjadi cermin dari kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan (Iqbal et al., 2024).

Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten turut menghadapi permasalahan yang serupa. Perkembangan kota yang relatif cepat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi pembangunan infrastruktur, pertumbuhan aktivitas ekonomi, maupun peningkatan jumlah penduduk, secara langsung berkontribusi pada meningkatnya timbulan sampah. Di sisi lain, kemampuan sistem pengelolaan sampah kota sering kali belum seimbang dengan dinamika tersebut. Pola penanganan sampah yang masih didominasi oleh pendekatan “kumpul–angkut–buang” dinilai tidak lagi memadai, karena hanya memindahkan masalah dari satu ruang ke ruang lain tanpa menyentuh akar persoalan, yaitu perilaku masyarakat dan pengelolaan sampah di sumbernya (Ni’attullah et al., 2022).

Permasalahan sampah menjadi salah satu isu lingkungan yang paling mendesak di berbagai daerah, termasuk Kota Serang. Pertumbuhan penduduk, pola konsumsi masyarakat, serta keterbatasan kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) menyebabkan volume sampah terus meningkat setiap tahun. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berupaya mengatasi persoalan ini dengan mengembangkan berbagai strategi pengurangan sampah dari sumbernya. Salah satu program yang menjadi

prioritas adalah pembentukan dan penguatan Bank Sampah sebagai instrumen pengelolaan sampah berbasis masyarakat (Sinlae, Samane, & Amaral, 2025).

Dalam konteks ini, pengelolaan sampah modern seharusnya tidak semata-mata bertumpu pada pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi tersebut dapat diwujudkan melalui keberadaan dan pengembangan bank sampah. Bank sampah hadir sebagai inovasi sosial yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga. Selain itu, bank sampah memiliki nilai tambah dalam aspek ekonomi karena sampah yang selama ini dianggap tidak bernilai dapat diolah menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat (Ritomiea et al., 2025).

Di Kota Serang, keberadaan bank sampah telah mulai dikembangkan di berbagai kelurahan dan lingkungan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, peran bank sampah tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih dijumpai berbagai kendala seperti rendahnya partisipasi warga, keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya manajemen kelembagaan bank sampah, serta belum meratanya pendampingan dan pembinaan dari pemerintah daerah (Khoiru et al., 2024). Tidak sedikit bank sampah yang hanya aktif pada tahap awal, tetapi kemudian mengalami stagnasi bahkan berhenti beroperasi karena minimnya dukungan dan keberlanjutan program.

Dalam situasi tersebut, Pemerintah Kota Serang memegang peranan penting dalam merumuskan dan melaksanakan strategi yang tepat untuk memperkuat peran bank sampah. Strategi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan persampahan, tetapi juga mencakup dimensi kelembagaan, regulasi, edukasi publik, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Tanpa strategi yang terarah dan berkelanjutan, bank sampah berpotensi hanya menjadi program formalitas yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap persoalan kebersihan dan keberlanjutan kota (Sudiyanto & Magfirah, 2025).

Upaya meningkatkan peran bank sampah juga sejalan dengan komitmen pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Kota yang bersih dan berkelanjutan bukan hanya ditandai oleh minimnya tumpukan sampah di ruang publik, tetapi juga oleh terbangunnya kesadaran kolektif masyarakat serta sistem pengelolaan lingkungan yang melibatkan banyak pihak secara aktif. Dalam hal ini, bank sampah dapat menjadi salah satu instrumen strategis untuk membangun budaya baru dalam pengelolaan sampah perkotaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam proses kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah di Kota Serang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menangkap makna dan pengalaman aktor secara alami dalam konteksnya, sebagaimana dijelaskan Creswell (2015) bahwa penelitian kualitatif menekankan eksplorasi fenomena kompleks melalui perspektif partisipan. Studi kasus digunakan karena fokus penelitian terikat pada satu sistem yang spesifik sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika kolaborasi yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen untuk memperoleh gambaran yang lebih kaya dan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan melalui proses pengodean dan penarikan tema secara bertahap, sedangkan keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan pengecekan ulang kepada

informan agar interpretasi tetap akurat dan sesuai konteks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Permasalahan Sampah dan Urgensi Bank Sampah di Kota Serang

Permasalahan sampah di Kota Serang menunjukkan kompleksitas yang khas bagi kota berkembang. Peningkatan jumlah penduduk, bertambahnya kawasan permukiman, serta perubahan pola konsumsi yang semakin mengarah pada penggunaan produk sekali pakai menyebabkan timbunan sampah meningkat secara signifikan setiap tahun. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan pengelolaan sampah tidak hanya terkait aspek teknis, tetapi juga erat dengan perilaku sosial masyarakat. Sistem pengelolaan yang masih didominasi oleh pola “kumpul–angkut–buang” tidak memberikan ruang perubahan perilaku di tingkat rumah tangga, sehingga sampah terus mengalir ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa proses pemilahan.

Dalam konteks tersebut, bank sampah hadir sebagai instrumen strategis untuk menahan laju peningkatan volume sampah. Bank sampah tidak sekadar menawarkan mekanisme pengurangan sampah, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Melalui pendekatan ini, masyarakat diajak untuk memilah sampah, memanfaatkan kembali material yang masih memiliki nilai, serta mengakses manfaat ekonomi dari kegiatan daur ulang. Namun, meskipun bank sampah telah diperkenalkan di berbagai kelurahan di Kota Serang, implementasinya tampak belum sepenuhnya konsisten.

Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Serang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah bank sampah belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan. Beberapa unit hanya berjalan pada tahap awal, kemudian berhenti akibat minimnya partisipasi, lemahnya kepengurusan, dan kurangnya pendampingan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terkait teknis, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam membangun ekosistem kolaboratif yang berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan pondasi utama keberhasilan bank sampah. Berdasarkan hasil wawancara, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Serang masih rendah. Banyak warga belum terbiasa memilah sampah dan cenderung menganggap kegiatan tersebut sebagai beban tambahan. Kondisi ini membuat beberapa bank sampah kekurangan pasokan sampah terpilah, sehingga aktivitasnya tidak dapat berjalan konsisten.

DLH menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan oleh belum berkembangnya kesadaran ekologis dan kurangnya pemahaman tentang manfaat bank sampah. Sosialisasi memang dilakukan, baik melalui kampung tematik maupun kegiatan edukasi, tetapi belum cukup menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tantangan lain muncul ketika masyarakat hanya aktif mengikuti kegiatan lomba atau program yang menawarkan insentif tertentu, tetapi tidak mempertahankan keberlanjutan kegiatan setelah program selesai.

Konsistensi perilaku menjadi tantangan signifikan. Banyak warga hanya menyetorkan sampah pada periode awal, tetapi selanjutnya berhenti karena tidak melihat dampak langsung, baik dalam bentuk ekonomi maupun lingkungan. Ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan partisipasi tidak dapat bergantung pada pendekatan informatif saja, tetapi membutuhkan pendekatan berbasis komunitas yang menekankan praktik bersama, edukasi berkelanjutan, serta pembentukan agen perubahan di tingkat lingkungan.

Kondisi Bank Sampah Aktif di Kota Serang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 48 bank sampah yang

beroperasi secara aktif di Kota Serang, yaitu unit-unit yang dinilai optimal karena memiliki kegiatan pemilahan yang rutin, kepengurusan yang berjalan, serta pencatatan dan alur pelaporan yang relatif tertib. Jumlah ini merupakan hasil dari proses pembinaan yang terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setelah sebelumnya terjadi fluktuasi akibat beberapa unit mengalami stagnasi. Keberadaan 48 unit aktif tersebut menggambarkan bahwa sebagian komunitas telah berhasil membangun kelembagaan yang cukup stabil, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga keberlanjutan operasionalnya dan memastikan agar seluruh bank sampah di berbagai kelurahan dapat mencapai tingkat aktivitas yang sama.

Kelembagaan Bank Sampah dan Tantangan Pengelolaannya

Kelembagaan bank sampah menjadi salah satu aspek paling menentukan keberhasilan program. Hasil penelitian menemukan bahwa banyak bank sampah di Kota Serang belum memiliki struktur organisasi yang stabil. Beberapa pengurus mengalami pergantian mendadak, ada yang berhenti karena faktor kesehatan, dan sebagian lainnya tidak memiliki administrasi yang rapi. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam operasional harian.

DLH sendiri mengakui bahwa ada fluktuasi jumlah bank sampah aktif, yang pernah mencapai lebih dari 50 unit, tetapi kemudian menurun menjadi sekitar 32 sebelum kembali meningkat sebagai hasil proses pembinaan. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa bank sampah masih rentan terhadap berbagai faktor internal.

Kelembagaan bank sampah juga menghadapi dilema ketika sebagian unit memilih mandiri dan tidak lagi melaporkan data ke bank sampah induk. Mereka memiliki akses langsung ke pengepul sehingga merasa tidak perlu terintegrasi dengan sistem kota. Akibatnya, data tidak terhimpun secara komprehensif. Hal ini menghambat pemerintah dalam memetakan capaian pengurangan sampah, padahal integrasi data merupakan elemen penting dalam pengelolaan sampah berbasis kolaborasi.

Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Kerangka Collaborative Governance

Dalam model Collaborative Governance, pemerintah berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai aktor dan menyediakan struktur kolaborasi. Pemerintah Kota Serang melalui DLH telah berupaya menjalankan peran tersebut melalui penyediaan sarana prasarana, pembinaan, sosialisasi, dan pembentukan Forum Bank Sampah (FBS). Forum ini ditujukan untuk mengkoordinasikan seluruh bank sampah agar memiliki arah kebijakan yang seragam.

DLH juga memperkenalkan program Kampung Resik Aman yang membantu mendorong masyarakat agar membentuk bank sampah sebagai salah satu indikator penilaian. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menarik perhatian masyarakat meskipun masih bersifat stimulus awal. Dukungan pemerintah melalui pemberian timbangan digital, bok maggot, serta pelatihan teknis menunjukkan adanya komitmen memperkuat peran bank sampah di tingkat komunitas.

Namun, pembinaan yang tidak merata menyebabkan beberapa unit tidak berkembang. Kapasitas pemerintah dalam melakukan pendampingan juga terbatas. Dalam hal ini, peran pemerintah sebagai fasilitator belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menjaga keberlanjutan program dan meratakan akses pendampingan ke seluruh unit bank sampah.

Kolaborasi Antaraktor dan Dinamika Hubungan di Lapangan

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kolaborasi antara aktor dalam pengelolaan bank sampah sudah terbangun, tetapi belum sepenuhnya stabil. Hubungan antara bank sampah unit dan bank sampah induk seharusnya bersifat saling melengkapi. Bank sampah unit bertugas mengumpulkan sampah terpilah dari warga, kemudian menyetorkannya ke bank sampah induk untuk diproses lebih lanjut dan dicatat ke dalam sistem. Namun,

beberapa unit memilih jalur distribusi berbeda dan menjual sampah langsung ke pengepul.

Perbedaan ini menimbulkan fragmentasi dalam sistem pengelolaan sampah. Bank sampah induk kehilangan suplai, sementara unit tidak dapat mengakses manfaat kolektif seperti pencatatan data, pelatihan, atau bantuan sarana. Dalam konteks Collaborative Governance, dinamika ini menunjukkan belum terbangunnya mekanisme insentif yang adil atau komitmen kolektif yang kuat antaraktor. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta melalui CSR masih bersifat sporadis. Perusahaan baru akan memberikan bantuan jika bank sampah memiliki legalitas dan struktur organisasi yang jelas. Akibatnya, hanya sebagian bank sampah yang dapat mengakses dukungan tersebut. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa kolaborasi perlu ditata ulang agar lebih terencana dan inklusif.

Tantangan Keberlanjutan dan Kebutuhan Penguatan Sistem

Keberlanjutan merupakan isu utama dalam pengelolaan bank sampah di Kota Serang. DLH mengungkapkan bahwa beberapa bank sampah berhenti beroperasi bukan karena ketiadaan sampah, tetapi karena kelelahan pengurus, minimnya dukungan komunitas, dan tidak adanya regenerasi kepengurusan. Selain itu, belum adanya insentif yang memadai membuat motivasi masyarakat cepat menurun.

Kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas. Walaupun pemerintah menyediakan beberapa sarana, tidak semua unit memiliki perlengkapan dasar seperti timbangan, alat pencacah, atau fasilitas pemilahan yang memadai. Selain itu, sistem pencatatan yang tidak seragam membuat keterbukaan informasi dan monitoring menjadi sulit dilakukan. Tantangan keberlanjutan ini menunjukkan bahwa program bank sampah membutuhkan intervensi yang lebih sistematis, terutama dalam hal penguatan kelembagaan, pembinaan berkelanjutan, integrasi data, dan penciptaan insentif yang relevan.

Implikasi Teoretis dalam Perspektif Collaborative Governance

Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika pengelolaan bank sampah di Kota Serang sangat dipengaruhi oleh kondisi awal para aktor yang terlibat. Partisipasi masyarakat yang belum merata, kapasitas pengurus yang berbeda-beda, serta motivasi yang tidak selalu stabil membuat proses kolaborasi sering terhambat. Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah menyediakan dasar kelembagaan melalui regulasi dan forum koordinasi, namun penerapannya belum sepenuhnya merata di seluruh bank sampah. Peran pemerintah sebagai fasilitator memang terlihat dalam berbagai bentuk pendampingan dan dukungan, tetapi keterbatasan sumber daya membuat tidak semua unit mendapatkan pembinaan secara konsisten. Proses kolaborasi yang berlangsung juga belum sepenuhnya stabil; koordinasi sudah berjalan, tetapi belum mampu membangun komitmen kolektif yang kuat, terutama karena integrasi data dan alur pelaporan masih kurang optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas bank sampah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi bergantung pada bagaimana hubungan antaraktor dibangun, dikelola, dan dipertahankan secara berkelanjutan.

Arah Penguatan Program Bank Sampah Kota Serang

Adanya sejumlah kebutuhan penting untuk memperkuat peran bank sampah di Kota Serang. Upaya peningkatan edukasi dan pendampingan menjadi hal yang mendesak mengingat perubahan perilaku masyarakat tidak dapat terjadi secara instan tanpa proses pembiasaan dan kesadaran yang berkelanjutan. Penguatan kelembagaan juga menjadi aspek krusial, terutama terkait legalitas, struktur kepengurusan, dan konsistensi administrasi agar bank sampah memiliki fondasi operasional yang stabil. Selain itu, keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh adanya insentif yang relevan bagi masyarakat maupun pengurus, sehingga motivasi tidak mudah menurun seiring waktu. Sistem pencatatan dan pelaporan juga perlu diintegrasikan agar proses monitoring lebih efektif dan pemerintah

dapat memetakan capaian pengurangan sampah secara lebih akurat. Di sisi lain, kolaborasi dengan sektor swasta perlu ditata lebih sistematis agar dukungan fasilitas maupun pendanaan tidak hanya bersifat sporadis. Regenerasi kepengurusan juga penting untuk menghindari ketergantungan pada individu tertentu, sehingga program dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun terjadi pergantian pengurus. Semua aspek tersebut membutuhkan forum koordinasi yang kuat agar bank sampah unit, bank sampah induk, dan pemerintah dapat bergerak selaras dalam mencapai tujuan pengurangan sampah di tingkat kota.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan bank sampah di Kota Serang masih terhambat oleh berbagai tantangan yang bersifat struktural, sosial, dan kelembagaan, yang berdampak pada efektivitas program dalam menciptakan kota yang bersih dan berkelanjutan. Hasil dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa walaupun jumlah bank sampah meningkat, kualitas operasional tidak tersebar merata. Banyak unit yang tidak berkembang karena rendahnya partisipasi masyarakat, pengelolaan yang kurang baik, keterbatasan sarana, serta belum optimalnya dukungan dari pemerintah. Situasi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat tidak bisa berjalan tanpa bantuan yang sistematis dan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Dari sudut pandang Tata Kelola Kolaboratif, dinamika ini menunjukkan bahwa di Kota Serang belum ada ekosistem kolaboratif yang kuat. Pemerintah, melalui Dinas Lingkungan Hidup, telah berperan sebagai fasilitator dengan program pembinaan, menyediakan fasilitas dasar, membentuk Forum Bank Sampah, dan melakukan sosialisasi berkelanjutan. Namun, keterbatasan sumber daya telah menghalangi upaya ini untuk merata ke seluruh unit bank sampah. Di sisi lain, relasi antara para actor baik bank sampah unit, bank sampah induk, masyarakat, maupun sektor swasta belum terwujud secara konsisten karena perbedaan kepentingan, kurangnya integrasi data, serta lemahnya insentif untuk menjaga komitmen bersama.

Penelitian ini menekankan bahwa kesuksesan bank sampah tidak semata-mata bergantung pada keberadaan unit-unit tersebut, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi, stabilitas kelembagaan, dan konsistensi pendampingan. Untuk memperkuat peran bank sampah di Kota Serang, diperlukan penguatan kelembagaan melalui penegakan legalitas dan struktur organisasi yang jelas, regenerasi dalam kepengurusan, serta standarisasi administrasi. Pemerintah juga harus meningkatkan kapasitas pendampingan, menciptakan mekanisme insentif yang sesuai bagi masyarakat dan pengurus, serta memastikan adanya integrasi data antara bank sampah unit dan induk. Kolaborasi dengan sektor swasta melalui program CSR perlu disusun lebih teratur agar dukungan tidak hanya tertuju pada unit yang sudah mapan.

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar fokusnya diperluas pada analisis terhadap kebijakan daerah, efektivitas forum koordinasi, atau studi perbandingan antar kota sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang praktik kolaboratif dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini juga membuka peluang untuk mengkaji model insentif sosial-ekonomi yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan penyetoran sampah. Dengan penguatan yang sistemik dan kolaborasi antara berbagai pihak yang lebih terarah, bank sampah di Kota Serang memiliki potensi untuk menjadi alat strategis dalam mewujudkan kota yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset: Memilih di antara lima pendekatan (Edisi ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Iqbal, M., Yudha Irianto, R., Kamaludin, A., & Fatmawati, F. (2024). Tantangan Penanganan Sampah di Kawasan Perkotaan (Studi Kualitatif). *urnal romotif reventif*, 7(2), 287-294.
- Khoiru Nisa, Z., Agusti, I. D., Winarti, A., Apriliansyah, I., & Zaty, F. P. (2024). Implementation of the Waste Bank Program in Handling Waste in the City of Serang. *Publicus : Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 302–314.
- Ni'mattulah, N., Sjafari, A., & Riswanda, R. (2022). Manajemen Pengelolaan Sampah di Kota Serang. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 10(1), 535–548.
- Ritomeia, R., Sholihah, D. D., & Nur Arumsari, D. (2025). Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah untuk Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 287–298.
- Sinlae, A. A. J., Samane, I. P. A. N., & Amaral, M. A. L. (2025). Transformasi Pengelolaan Bank Sampah Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi: Peluang Ekonomi Baru. *Bakti Cendana*, 8(1), 40–52.
- Sudiyanto, I. W., & Magfirah, S. H. (2025). Strategi Penguatan Bank Sampah dalam Implementasi Zero Waste di Indonesia: Pendekatan Berbasis Studi Literatur. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 4(2), 178–192.
- Suryani, E., & Hidayat, A. (2018). Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 112–124.
- Wibowo, A., & Nurcahyanto, H. (2020). Kolaborasi multi-aktor dalam pengelolaan bank sampah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 55–67.